

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penulis Tahun	Afiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Citra Polisi: Penggambaran Citra Polisi di Surat Kabar Kompas dan Pos Kota Periode Januari – Agustus 2004 Sari Dewi Kusumayantie 2005	Universitas INDONUS A Esa Unggul, Jakarta	Analisis isi kuantitatif terhadap berita di surat kabar Kompas dan Pos Kota	Kompas dan Pos Kota menggambarkan citra polisi secara positif dalam aspek kinerja, kompetensi, dan profesionalitas. Namun, aspek moralitas polisi lebih banyak diberitakan secara negatif.	Perlu adanya perbaikan dalam citra moralitas kepolisian agar kepercayaan publik meningkat serta pendekatan media yang lebih berimbang dalam pemberitaan mengenai kepolisian.	Penelitian ini berfokus pada media cetak (surat kabar), sedangkan penelitian ini meneliti pemberitaan kepolisian dalam media daring menggunakan metode analisis isi kuantitatif.
2.	Citra Kepolisian dalam Konten Twitter Humas Polri (@DivHumas_Polri): Analisis Isi Kualitatif Konten Humas Polri tanggal 19–22 Agustus 2019 Pasca Insiden Pengepungan Mahasiswa di Papua Asrama Kamasan, Surabaya Hanif Mufadlilah 2020	Universitas Gadjah Mada	Analisis isi kuantitatif	Humas Polri menampilkan citra persaudaraan dan cinta kasih terhadap Papua, namun audiens menilai adanya unsur rasisme dan tindakan represif.	Diperlukan pendekatan komunikasi digital yang lebih terbuka dan empati untuk membangun kepercayaan publik, khususnya dalam krisis yang sensitif.	Penelitian ini menggunakan platform media sosial (Twitter) dan berfokus pada respons komunikasi krisis, berbeda dari fokus media massa atau surat kabar.
3.	Analisis Isi Komunikasi Publik Polri Terkait Mudik Libur Natal dan Tahun Baru Rulinawaty 2022	Universitas Terbuka & Universitas Langlangbuana	Analisis isi kuantitatif	Komunikasi publik Polri didominasi pesan informasi keselamatan selama libur Natal dan konteks pandemi.	Perlu peningkatan kualitas pesan visual dan bahasa agar lebih efektif dalam menjangkau publik digital.	Fokus pada komunikasi terencana melalui Instagram dan konteks kampanye keselamatan, berbeda dari fokus pemberitaan media tentang citra polisi dalam keseharian.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Penelitian mengenai citra kepolisian dalam media telah banyak dilakukan dalam berbagai pendekatan, baik melalui analisis isi, analisis wacana, maupun analisis *framing*. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mencakup kajian tentang pemberitaan media daring dan cetak dalam membentuk citra kepolisian. Berikut adalah tiga penelitian yang menjadi dasar referensi dalam penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Sari Dewi Kusumayantie (2005) dengan judul *Citra Polisi: Penggambaran Citra Polisi di Surat Kabar Kompas dan Pos Kota Periode Januari – Agustus 2004*. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk meneliti bagaimana surat kabar Kompas dan Pos Kota membentuk citra kepolisian melalui pemberitaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media cenderung menggambarkan kepolisian secara positif dalam aspek kinerja, kompetensi, dan profesionalitas, namun lebih banyak menampilkan aspek moralitas kepolisian secara negatif. Saran yang diberikan adalah perlunya perbaikan citra kepolisian terutama dalam aspek moralitas agar meningkatkan kepercayaan publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian Kusumayantie berfokus pada media cetak, sedangkan penelitian ini akan meneliti media daring dalam membentuk citra kepolisian.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hanif Mufadlilah (2020) dengan judul *Citra Kepolisian dalam Konten Twitter Humas Polri (@DivHumas_Polri): Analisis Isi Kualitatif Konten Humas Polri tanggal 19–22 Agustus 2019 Pasca Insiden Pengepungan Mahasiswa Papua di Asrama Kamasan, Surabaya*. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk menganalisis bagaimana Humas Polri membentuk citra institusi melalui unggahan di media sosial Twitter pasca-insiden pengepungan mahasiswa Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polri berupaya membangun citra positif melalui narasi persaudaraan dan cinta kasih terhadap Papua, namun audiens di media sosial justru menilai adanya tindakan represif dan nuansa rasisme. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya pendekatan komunikasi digital yang lebih terbuka dan empati, khususnya dalam menangani isu-isu sensitif yang berkaitan dengan etnis dan HAM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah bahwa penelitian Mufadlilah menitikberatkan pada komunikasi krisis melalui media sosial,

sedangkan penelitian ini berfokus pada representasi citra polisi dalam pemberitaan media daring secara umum.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rulinawaty (2022) dengan judul Analisis Isi Komunikasi Publik Polri Terkait Mudik Libur Natal dan Tahun Baru. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan Krippendorff untuk menganalisis pesan-pesan komunikasi publik yang disampaikan oleh akun Instagram resmi @divisihumaspolri selama periode 1–20 Desember 2021 menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten yang disampaikan Polri lebih banyak menekankan aspek keselamatan dan keamanan masyarakat selama masa mudik, terutama dalam konteks pandemi Covid-19. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan efektivitas pesan, baik dari segi bahasa maupun visual, agar lebih mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat pengguna media sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah bahwa penelitian ini fokus pada komunikasi terencana dan preventif dari institusi kepolisian melalui media sosial, sementara penelitian ini akan menelaah representasi citra polisi dalam pemberitaan media daring yang bersifat reaktif terhadap peristiwa.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa citra kepolisian dalam media dapat dibentuk melalui berbagai teknik pemberitaan, baik dalam media cetak maupun media daring. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana media daring secara umum membingkai citra kepolisian, terutama dalam konteks pemberitaan terkini dan penggunaannya dalam era digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis pola pemberitaan media daring terhadap kepolisian menggunakan metode analisis isi kuantitatif.

2.2. Teori dan Konsep

2.2.1. Media Daring

Media daring atau media *online* merupakan bentuk evolusi dari media massa yang memanfaatkan jaringan internet sebagai platform utama dalam penyebaran informasi (Pavlik & McIntosh, 2019). Media daring memungkinkan distribusi berita secara cepat, interaktif, serta dapat diakses oleh audiens global tanpa batasan waktu dan lokasi (Dominick, 2020). Berbeda dengan media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar, media daring memiliki karakteristik digital yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara langsung melalui fitur komentar, berbagi, dan reaksi terhadap konten berita.

Perkembangan media daring dimulai sejak munculnya internet pada akhir abad ke-20, di mana berbagai institusi media mulai beralih dari format cetak ke digital. Di Indonesia, media daring mulai berkembang pesat pada awal tahun 2000-an, dengan kemunculan portal berita seperti Detik.com, Kompas.com, dan Tempo.co yang menjadi pelopor jurnalisme digital di Tanah Air (Nugroho et al., 2018). Seiring berjalannya waktu, media daring tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, tetapi juga memanfaatkan multimedia seperti video, podcast, dan infografis untuk menarik perhatian audiens yang semakin dinamis dalam mengonsumsi informasi.

Media daring memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari media konvensional. Menurut McQuail (2020) dan Siopera (2018), karakteristik media daring dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Digital

Media daring menggunakan teknologi digital dalam penyampaian informasi, sehingga memungkinkan integrasi teks, audio, video, dan gambar dalam satu platform.

2. Interaktif

Pengguna dapat berinteraksi dengan konten, jurnalis, dan sesama pembaca melalui fitur komentar, forum diskusi, atau media sosial yang terhubung dengan berita daring.

3. Cepat dan *Real-time*

Informasi dapat dipublikasikan dalam hitungan detik dan terus diperbarui seiring dengan perkembangan suatu peristiwa.

4. Aksesibilitas Tinggi

Media daring dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau *smartphone*.

5. Personalisasi

Pengguna dapat menyesuaikan pengalaman mereka dengan memilih topik atau kategori berita yang sesuai dengan minat mereka.

6. *Hypertextuality*

Konten dalam media daring sering kali memiliki tautan (*hyperlink*) yang menghubungkan satu berita dengan sumber lain, memungkinkan pembaca untuk mengeksplorasi informasi lebih dalam.

7. Multimedia

Media daring tidak hanya menampilkan teks tetapi juga menyertakan elemen multimedia seperti infografis, video, dan podcast untuk memperkaya pengalaman pengguna.

Selain itu, media daring juga menghadirkan tantangan baru dalam dunia jurnalisme, seperti persaingan informasi yang semakin ketat, penyebaran berita hoaks, serta permasalahan etika dalam pemberitaan (Ward, 2019). Media daring sering kali menghadapi tekanan untuk menghasilkan berita dengan kecepatan tinggi, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas dan akurasi informasi yang disajikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika media daring sangat penting dalam menilai bagaimana platform ini memengaruhi opini publik, membentuk wacana sosial, serta berkontribusi terhadap perkembangan komunikasi massa di era digital.

Dalam konteks penelitian ini, media daring memiliki peran sentral dalam membentuk citra institusi publik, termasuk kepolisian, melalui pemberitaan yang disajikan. Citra polisi dalam media daring dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemilihan narasumber, nada pemberitaan, serta nilai berita yang dikedepankan oleh media. Dengan menelaah pemberitaan di media daring seperti

Kompas.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id, penelitian ini berupaya memahami bagaimana citra polisi dikonstruksi dalam ruang digital, serta sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap persepsi publik terhadap institusi kepolisian dalam satu tahun terakhir pemerintahan Jokowi periode Oktober 2023 - Oktober 2024.

2.2.2. Jurnalisme Daring

Jurnalisme daring, atau jurnalisme online, merujuk pada praktik jurnalistik yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi berita. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap media, memungkinkan berita disampaikan secara *real-time* dan diakses oleh audiens global tanpa batasan geografis. Hal ini menandai pergeseran signifikan dari media tradisional seperti cetak dan penyiaran ke platform digital.

1. Karakteristik Jurnalisme Daring

Beberapa karakteristik utama jurnalisme daring meliputi:

a. Kecepatan dan Aktualisasi

Media daring mampu menyampaikan berita dengan cepat dan terus diperbarui seiring perkembangan informasi. Kemampuan ini memungkinkan jurnalis untuk memberikan laporan secara *real-time*, menjadikan berita lebih dinamis dan responsif terhadap peristiwa yang terjadi.

b. Interaktivitas

Platform daring memungkinkan interaksi langsung antara jurnalis dan audiens melalui fitur komentar, forum diskusi, dan media sosial. Interaktivitas ini menciptakan dialog dua arah yang dapat meningkatkan keterlibatan pembaca dan memberikan umpan balik langsung kepada jurnalis.

c. Multimedia

Penggunaan elemen multimedia seperti teks, gambar, video, dan infografis memperkaya penyajian berita. Integrasi berbagai format ini membantu

menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens.

d. Aksesibilitas dan Probabilitas

Berita daring dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung ke internet, seperti *smartphone*, tablet, atau komputer. Hal ini meningkatkan kenyamanan bagi pembaca dalam mengakses informasi sesuai kebutuhan mereka.

2. Dimensi Jurnalisme Daring

Dalam jurnalisme daring, terdapat beberapa dimensi penting yang mempengaruhi kualitas dan penyajian berita, yaitu jenis berita, nilai berita, dan narasumber, antara lain:

a. Jenis Berita

Berita dalam jurnalisme daring dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1) *Straight News*

Berita langsung yang menyajikan informasi faktual secara ringkas dan jelas tanpa opini atau analisis mendalam. Jenis berita ini biasanya digunakan untuk melaporkan peristiwa terkini yang membutuhkan penyampaian cepat.

2) *Feature*

Berita yang menggali lebih dalam suatu topik atau peristiwa, seringkali dengan pendekatan human interest untuk menarik perhatian pembaca. Feature memberikan konteks dan latar belakang yang lebih kaya dibandingkan straight news.

3) *In-Depth Reporting*

Laporan mendalam yang menganalisis isu atau peristiwa secara komprehensif, seringkali melibatkan penelitian dan investigasi yang ekstensif. Jenis berita ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam kepada audiens.

4) *Opinion/Editorial*

Tulisan yang menyajikan pandangan atau opini penulis atau institusi media terhadap suatu isu. Meskipun subyektif, opini harus didasarkan

pada fakta dan analisis yang kuat untuk mendukung argumen yang disampaikan.

b. Nilai Berita

Nilai berita adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu peristiwa atau informasi untuk dijadikan berita. Beberapa nilai berita yang umum diterapkan dalam jurnalisme daring meliputi:

- 1) Kedekatan (*Proximity*): Peristiwa yang terjadi di lokasi geografis yang dekat dengan audiens cenderung memiliki nilai berita lebih tinggi karena relevansi dan dampaknya yang lebih langsung.
- 2) Kebaruan (*Timeliness*): Informasi terbaru atau peristiwa yang baru saja terjadi memiliki nilai berita tinggi karena audiens cenderung mencari informasi terkini.
- 3) Dampak (*Impact*): Peristiwa yang mempengaruhi banyak orang atau memiliki konsekuensi signifikan akan dianggap lebih bernilai sebagai berita.
- 4) Ketokohan (*Prominence*): Keterlibatan tokoh terkenal atau figur publik dalam suatu peristiwa meningkatkan nilai beritanya karena ketertarikan audiens terhadap individu tersebut.
- 5) Konflik (*Conflict*): Situasi yang melibatkan pertentangan atau kontroversi seringkali menarik perhatian lebih besar, sehingga memiliki nilai berita yang tinggi.
- 6) Keunikan (*Oddity*): Peristiwa atau informasi yang unik, aneh, atau tidak biasa dapat menarik minat audiens karena faktor keunikannya.

c. Narasumber

Narasumber adalah individu atau entitas yang memberikan informasi, pendapat, atau data yang digunakan dalam penyusunan berita. Pemilihan narasumber yang tepat dan kredibel sangat penting dalam jurnalisme daring untuk memastikan akurasi dan kepercayaan informasi yang disampaikan. Beberapa pertimbangan dalam memilih narasumber meliputi:

- 1) Kredibilitas: Narasumber harus memiliki reputasi yang baik dan diakui keahliannya dalam bidang terkait.

- 2) Relevansi: Narasumber harus memiliki keterkaitan langsung dengan topik atau peristiwa yang diberitakan.
- 3) Objektivitas: Preferensi diberikan kepada narasumber yang dapat memberikan informasi secara netral tanpa bias yang signifikan.
- 4) Aksesibilitas: Kemudahan akses dan kesediaan narasumber untuk memberikan informasi juga menjadi pertimbangan penting.

Dalam konteks penelitian ini, jurnalisme daring berperan penting dalam membentuk dan menyebarkan citra polisi di masyarakat. Citra polisi dalam pemberitaan media daring dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek jurnalistik, seperti pemilihan jenis berita, nilai berita yang dikedepankan, serta narasumber yang diwawancarai dalam laporan. Selain itu, nada pemberitaan juga menjadi faktor krusial dalam menentukan bagaimana institusi kepolisian dipersepsikan oleh publik. Dengan menelaah pemberitaan mengenai kepolisian di Kompas.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id selama satu tahun terakhir pemerintahan Jokowi periode Oktober 2023 - Oktober 2024, penelitian ini bertujuan untuk memahami pola pemberitaan, kecenderungan citra yang terbentuk, serta dampaknya terhadap persepsi publik terhadap kepolisian.

2.2.3. Tema Berita Polisi

Berita merupakan informasi faktual yang disusun secara sistematis dan disampaikan kepada publik melalui berbagai platform media massa, baik cetak, elektronik, maupun daring. Berita yang baik harus memenuhi prinsip dasar jurnalistik, yaitu mencakup enam unsur utama yang dikenal sebagai 5W + 1H (*what, who, when, where, why, and how*). Menurut Shoemaker & Reese (2019), berita tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga dapat digunakan untuk membentuk persepsi publik terhadap suatu institusi, seperti Polisi. Oleh karena itu, cara media dalam membingkai berita memiliki pengaruh besar terhadap citra yang terbentuk di masyarakat.

Dalam konteks pemberitaan mengenai Polisi, *framing* menjadi salah satu strategi penting dalam menyajikan informasi. *Framing* adalah proses seleksi dan

penekanan aspek tertentu dalam suatu berita untuk membentuk interpretasi tertentu di benak audiens (Entman, 2018). Media memiliki peran dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa atau institusi dipersepsikan oleh publik, tergantung pada bagaimana berita tersebut dikonstruksi. Misalnya, pemilihan narasumber, sudut pandang, dan penggunaan diksi tertentu dalam pemberitaan dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami kinerja dan kebijakan Polisi.

Media seperti Detik.com dan Tempo.com memiliki gaya pemberitaan yang berbeda dalam membingkai Polisi. Detik.com cenderung lebih cepat dalam menyampaikan berita dengan format yang ringkas dan aktual, sedangkan Tempo.com lebih analitis dan kritis dalam mengupas suatu isu (Hanitzsch & Mellado, 2022). Perbedaan ini memengaruhi bagaimana citra Polisi dibentuk di kedua media tersebut. Jika media secara konsisten menampilkan Polisi dalam konteks yang positif, misalnya dengan menonjolkan keberhasilan dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum, maka citra Polisi akan meningkat. Sebaliknya, jika media lebih banyak mengangkat berita yang menyoroti kelemahan atau kontroversi dalam institusi tersebut, maka citra Polisi di mata masyarakat dapat menurun.

Untuk menilai nilai berita atau *news judgment* dalam pemberitaan mengenai Polisi, dapat digunakan kriteria *news worthiness* (Lenora & Tania, 2023), yaitu:

1. Kinerja Polisi. Kinerja polisi merujuk pada efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum, pelayanan publik, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Kompetensi Polisi. Kompetensi polisi mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas individu dalam menjalankan tugasnya, termasuk kemampuan analisis, pengambilan keputusan, serta keterampilan komunikasi.
3. Profesional. Profesionalisme polisi ditandai dengan sikap disiplin, etika kerja, dan standar operasional yang sesuai dengan kode etik kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara adil dan bertanggung jawab.
4. Moralitas. Moralitas polisi mengacu pada prinsip etika dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas, termasuk integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan.

5. Lainnya. Indikator lainnya mencakup berbagai aspek pemberitaan tentang kepolisian yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya.

Dalam penelitian ini, tema berita yang berkaitan dengan citra Polisi dianalisis melalui pemberitaan di Kompas.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id selama satu tahun terakhir pemerintahan Jokowi periode Oktober 2023 - Oktober 2024. Dengan menganalisis pemberitaan mengenai Polisi dalam tiga media daring tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana media membentuk citra kepolisian di tengah masyarakat (Tunardi, 2023). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pemberitaan, faktor-faktor yang mempengaruhi berita, serta dampak yang dihasilkan terhadap persepsi publik terhadap Polisi.

2.2.4. Citra Polisi

Citra polisi merujuk pada persepsi dan penilaian masyarakat terhadap institusi kepolisian, mencakup aspek profesionalisme, integritas, dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Citra ini terbentuk melalui interaksi langsung antara polisi dan masyarakat serta representasi polisi dalam berbagai media, termasuk media daring. Media daring memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik mengenai polisi, baik melalui pemberitaan positif maupun negatif (McQuail, 2020).

Dalam konteks Indonesia, citra polisi mengalami fluktuasi seiring waktu. Survei Litbang Kompas pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 65,7% responden memberikan penilaian positif terhadap Polisi, meskipun angka ini masih di bawah citra positif DPR yang mencapai 67% (Kompas, 2025). Namun, survei lain oleh GoodStats mengungkapkan bahwa 60,8% responden tidak yakin polisi dapat berperilaku bersih, profesional, dan mengayomi (GoodStats, 2024). Perbedaan hasil survei ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap polisi masih beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi turut mempengaruhi citra institusi kepolisian. Berbagai kasus penyalahgunaan

wewenang di lingkungan Polda Metro Jaya, misalnya, memperburuk citra Polisi di tengah masyarakat (Kompas, 2023). Insiden-insiden semacam ini menekankan pentingnya komitmen tegas dalam upaya perbaikan citra polisi. Hal ini selaras dengan penelitian Haryanto (2021) yang menyebutkan bahwa citra polisi sangat bergantung pada bagaimana mereka menanggapi kritik dan melakukan reformasi internal dalam menghadapi tantangan etika dan profesionalisme.

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polisi juga menjadi indikator penting dalam menilai citra polisi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menekankan bahwa profesionalisme personel Polisi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polisi (LIPI, 2022). Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme dan kualitas layanan menjadi kunci dalam membangun citra positif yang lebih baik.

- Selain itu, persepsi masyarakat terhadap polisi dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan interaksi sehari-hari. Di Kabupaten Purworejo, misalnya, masyarakat memiliki pandangan bahwa aparat penegak hukum terkesan rapuh dan cenderung memihak kepada pihak yang lebih kuat, sementara yang lemah sering kali tidak mendapatkan keadilan (Rahmawati, 2023). Pandangan semacam ini menunjukkan bahwa persepsi negatif dapat terbentuk akibat ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak adil.

Citra polisi dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama, antara lain (Lenora & Tania, 2023):

- 1. Kinerja**

Kinerja polisi mencerminkan hasil pekerjaan mereka dalam menegakkan hukum, menangani kejahatan, dan melindungi masyarakat. Polisi yang berhasil mengungkap kasus kejahatan atau bertindak cepat dalam menangani insiden akan memiliki citra positif di media. Sebaliknya, kegagalan dalam menindak kasus kriminal atau lambannya respons terhadap laporan masyarakat dapat menciptakan citra negatif.

- 2. Kompetensi**

Kompetensi mengacu pada keahlian teknis polisi, seperti keterampilan investigasi, penggunaan teknologi, dan kemampuan analisis dalam

menyelesaikan kasus. Media cenderung menyoroiti apakah polisi memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani kejahatan yang semakin kompleks. Jika polisi menunjukkan keahlian tinggi, citra mereka akan positif, tetapi jika mereka dianggap tidak kompeten atau salah menangani kasus, maka citra mereka akan negatif.

3. Profesionalitas

Profesionalitas polisi diukur dari sejauh mana mereka bekerja sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan kode etik kepolisian. Media menilai profesionalitas polisi berdasarkan apakah mereka bertindak adil, tidak berpihak, dan menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel. Polisi yang sering melanggar prosedur atau terlibat dalam tindakan represif akan memiliki citra negatif.

4. Moralitas

- Moralitas berkaitan dengan integritas dan perilaku etis polisi, termasuk kejujuran, transparansi, dan kebebasan dari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Jurnal menunjukkan bahwa aspek moralitas sering menjadi tantangan terbesar bagi citra polisi. Banyak berita yang menyoroiti praktik korupsi, pemerasan, atau tindakan tidak etis lainnya yang dilakukan oleh oknum polisi, sehingga menciptakan persepsi negatif di masyarakat.

Menurut Dwidja (2017), citra polisi yang ditampilkan media dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Citra positif

Muncul ketika pemberitaan menunjukkan polisi sebagai institusi yang bekerja secara profesional, kompeten, dan bermoral. Contohnya meliputi keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus besar, memberikan pelayanan publik yang cepat dan responsif, serta menjalankan tugas sesuai dengan prosedur hukum dan etika. Citra positif ini membangun kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa Polri mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dalam masyarakat.

2. **Citra negatif**

Terbentuk ketika media mengangkat sisi-sisi buruk dari perilaku polisi atau kelemahan dalam institusi, seperti tindakan represif terhadap masyarakat, penyalahgunaan wewenang, keterlibatan dalam kasus korupsi, lambannya penanganan kasus, atau pelanggaran HAM. Pemberitaan negatif ini sering kali memperkuat persepsi publik bahwa reformasi dalam tubuh kepolisian belum berjalan secara optimal, serta menciptakan jarak antara polisi dan masyarakat.

3. **Citra netral**

Citra netral terbentuk ketika pemberitaan tentang polisi disampaikan secara objektif tanpa memberikan penilaian positif maupun negatif. Berita semacam ini biasanya hanya menyampaikan fakta atau peristiwa apa adanya, tanpa menyisipkan opini, pujian, atau kritik, sehingga pembaca dapat menilai sendiri informasi yang disajikan berdasarkan data yang tersedia.

Dengan mengacu pada aspek-aspek tersebut, analisis citra polisi dalam media daring dapat lebih mendalam, tidak hanya melihat opini publik secara umum tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepolisian. Secara keseluruhan, citra polisi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tindakan nyata polisi, representasi mereka di media, dan persepsi masyarakat. Untuk membentuk citra yang positif, diperlukan upaya kolaboratif antara institusi kepolisian, media, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan transparan (Putra, 2024). Dengan transparansi informasi, keterbukaan terhadap kritik, dan peningkatan interaksi positif dengan masyarakat, citra polisi dapat terus diperbaiki di masa mendatang.

Dalam konteks penelitian ini, analisis mengenai citra polisi menjadi relevan untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap polisi terbentuk melalui pemberitaan di media daring. Media seperti Kompas.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyajikan informasi mengenai kepolisian, yang dapat memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam pemberitaan

terkait citra polisi, jenis berita yang mendominasi, nilai berita yang digunakan, narasumber yang diwawancarai, serta nada pemberitaan yang disampaikan dalam satu tahun terakhir pemerintahan Jokowi periode Oktober 2023 – Oktober 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana media membentuk citra polisi serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap persepsi publik terhadap institusi kepolisian.

2.2.5. Isu Polisi di Satu Tahun Pemerintahan Jokowi Periode Oktober 2023 - Oktober 2024

Pada periode Oktober 2023 - Oktober 2024, tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polisi) menghadapi berbagai isu yang mempengaruhi citra dan kepercayaan publik. Isu-isu tersebut mencakup kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta upaya reformasi internal.

Salah satu isu utama dalam kepolisian adalah penggunaan kekerasan berlebihan, terutama dalam menangani demonstrasi atau tersangka kriminal. Akar permasalahan dari tindakan represif ini adalah budaya impunitas di dalam tubuh Polisi serta minimnya mekanisme pengawasan eksternal yang kuat (Santoso, 2023). Dalam kasus penanganan demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada 2023, beberapa aparat terekam melakukan kekerasan terhadap peserta aksi yang tidak melakukan perlawanan. Video kejadian tersebut viral di media sosial, memicu kemarahan publik dan desakan agar para pelaku diberi sanksi tegas (Setiawan, 2024). Namun, alih-alih mendapatkan hukuman berat, beberapa oknum yang terlibat hanya dijatuhi sanksi administratif berupa mutasi ke wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal Polisi masih lemah dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya (Lembaga Kajian HAM, 2024).

Korupsi dalam kepolisian juga menjadi permasalahan serius yang terus berulang. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan pemerasan oleh oknum kepolisian terhadap warga negara asing di Jakarta pada Desember 2023. Dalam kasus ini, beberapa turis ditahan dengan tuduhan penggunaan narkoba dan dipaksa membayar sejumlah uang agar dibebaskan (Harian Investigasi, 2024). Akar

permasalahannya terletak pada lemahnya pengawasan terhadap anggota kepolisian serta rendahnya kesejahteraan anggota polisi di tingkat bawah, yang sering kali mendorong mereka mencari tambahan penghasilan melalui cara ilegal (Rahman & Putri, 2023). Setelah kasus ini mendapat perhatian internasional dan sorotan media, Kapolisi akhirnya menindak beberapa oknum yang terlibat dengan sanksi pemecatan dan proses hukum pidana. Namun, kasus serupa terus bermunculan, menandakan bahwa akar masalah sistemis belum sepenuhnya terselesaikan (Pusat Studi Anti-Korupsi, 2024).

Selain kasus korupsi, ada juga berbagai tindak kriminal yang dilakukan oleh anggota polisi, termasuk penyalahgunaan narkoba dan kejahatan seksual. Salah satu kasus yang menghebohkan terjadi pada Januari 2023, ketika seorang anggota polisi di Pamekasan ditangkap karena menjual istrinya kepada rekan sesama polisi (Tempo, 2023). Kasus ini mengungkap adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di lingkungan internal kepolisian, serta lemahnya sistem seleksi dan pengawasan terhadap personel kepolisian (Nasution, 2024). Setelah mendapat tekanan publik, pelaku akhirnya diberhentikan dari kepolisian dan dijatuhi hukuman pidana (Mahkamah Negeri Pamekasan, 2024). Namun, kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan, dan reformasi dalam rekrutmen serta pelatihan etika kepolisian menjadi hal yang mendesak (Badan Reformasi Kepolisian, 2024).

Kepolisian juga sering dikritik karena berusaha membungkam kritik dari publik, termasuk seniman dan jurnalis. Pada tahun 2024, sebuah band punk Indonesia bernama Sukatani dipaksa meminta maaf setelah merilis lagu "Pay Pay Pay" yang menyoroti praktik korupsi dalam kepolisian (Jurnal Musik & Perlawanan, 2024). Setelah lagu tersebut viral, anggota band mendapat tekanan dari aparat, dan mereka akhirnya dipanggil oleh petugas siber untuk menghapus lagu tersebut dari semua platform digital (Surat Kabar Rakyat, 2024). Akar permasalahannya adalah kurangnya toleransi terhadap kritik serta masih kuatnya pendekatan otoriter dalam tubuh kepolisian (Prasetyo, 2024). Meskipun tekanan publik terhadap kasus ini cukup besar, tidak ada konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada aparat yang terlibat dalam upaya pembungkaman tersebut,

menunjukkan masih adanya ketidakjelasan dalam perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia (Yayasan Kebebasan Berekspresi, 2024).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, kepolisian sebenarnya telah melakukan beberapa langkah reformasi, seperti meningkatkan jumlah penerimaan anggota baru dengan standar yang lebih ketat serta memperkuat pengawasan internal (Kementerian Dalam Negeri, 2024). Pada tahun 2024, Polisi membuka kesempatan bagi 12.800 calon Bintara yang akan ditempatkan di berbagai bidang, termasuk pelayanan publik, kehumasan, dan pariwisata (Indonesia.go.id, 2024). Namun, reformasi ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan (Lembaga Kajian Reformasi, 2024). Selain itu, perlu adanya pengawasan eksternal yang lebih kuat agar kepolisian tidak hanya melakukan reformasi secara simbolis, tetapi benar-benar memperbaiki sistem kerja mereka (Suharto, 2024).

- Untuk meningkatkan profesionalisme, Polisi membuka kesempatan bagi 12.800 calon Bintara pada tahun 2024. Lulusan ini akan ditempatkan di berbagai bidang seperti pelayanan tugas umum, tenaga kesehatan, hukum, kehumasan, dan pariwisata. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepolisian dan memperbaiki citra institusi di mata masyarakat (Indonesia.go.id, 2024). Namun, tantangan tetap ada. Indeks Perilaku Anti-Korupsi Indonesia pada tahun 2024 menurun menjadi 3,85 dari 3,92 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa perilaku anti-korupsi di masyarakat, termasuk di institusi pemerintah seperti Polisi, masih perlu ditingkatkan (BPS, 2024).

Selain itu, menjelang tahun politik 2024, Presiden Jokowi mendorong semua pihak untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Polisi, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan netral, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang meningkat (Kementerian PANRB, 2023). Secara keseluruhan, periode Oktober 2023 - Oktober 2024 menandai tantangan signifikan bagi Polisi dalam upaya memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik. Kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan anggotanya menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi internal dan peningkatan integritas. Upaya rekrutmen dan pelatihan yang ditingkatkan merupakan langkah positif, namun efektivitasnya

akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang konsisten dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas.

2.2.6. Operasionalisasi Konsep

Tabel 2.2 Indikator dan Definisi Operasional

No	Kategori	Indikator	Bentuk
1	Tema Berita	Kinerja Polisi	Kinerja polisi merujuk pada efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum, pelayanan publik, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Lenora & Tania, 2023).
		Kompetensi Polisi	Kompetensi polisi mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas individu dalam menjalankan tugasnya, termasuk kemampuan analisis, pengambilan keputusan, serta keterampilan komunikasi (Lenora & Tania, 2023).
		Profesional	Profesionalisme polisi ditandai dengan sikap disiplin, etika kerja, dan standar operasional yang sesuai dengan kode etik kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara adil dan bertanggung jawab (Lenora & Tania, 2023).
		Moralitas	Moralitas polisi mengacu pada prinsip etika dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas, termasuk integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan (Lenora & Tania, 2023).
		Lainnya	Indikator lainnya mencakup berbagai aspek pemberitaan tentang kepolisian yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. (Lenora & Tania, 2023).
2	Jenis Berita	<i>Hard News</i>	<i>Hard news</i> merupakan berita yang memiliki nilai berita yang sangat penting untuk masyarakat mengenai peristiwa terkini (Latief, 2021).
		<i>Soft News</i>	<i>Soft news</i> , merupakan berita yang menyajikan informasi ringan bertujuan untuk menghibur, menambah wawasan, serta menarik emosi masyarakat (Latief, 2021).
3	Nilai Berita	<i>Magnitude</i> (Besar)	<i>Magnitude</i> (Besar) sebagai peristiwa yang mencantumkan angka -angka yang memiliki pengaruh bagi masyarakat (Latief, 2021).
		<i>Significace</i> (Penting)	<i>Significance</i> (Penting) merupakan suatu peristiwa yang memiliki pengaruh atau akibat kepada kehidupan masyarakat (Latief, 2021).
		<i>Conflict</i> (Konflik)	Konflik (<i>Conflict</i>) merupakan nilai berita yang mencakup peristiwa pertentangan

			baik itu antar individu atau kelompok yang mampu menarik minat audiens. Seperti halnya demonstrasi, kriminal, perang dalam pemberitaan (Anam, 2014) (Latief, 2021). <i>Timeliness</i> (waktu) sebagai tolak ukur nilai berita yang menekankan pada kebaruan mengutamakan kecepatan dalam penyajian beritanya. Berita sebagai pusat informasi jika semakin baru peristiwa dan segera ditayangkan sehingga semakin tinggi nilai beritanya (Latief, 2021). <i>Proximity</i> (Kedekatan) sebuah peristiwa dengan masyarakat akan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk membaca berita tersebut. kedekatan ini dihubungkan dengan psikologis, sosiologis, dan budaya (Latief, 2021). <i>Human interest</i> (Manusiawi) Berita yang menyangkut kemanusiaan ini diduga akan menarik empati, simpati, atau menyentuh perasaan masyarakat yang membaca berita tersebut (Latief, 2021). <i>Oddity</i> (Unik) Peristiwa yang mengandung hal unik akan meningkatkan perhatian masyarakat. Hal unik meliputi sebuah hobi yang tidak umum akan memiliki nilai berita (Latief, 2021). <i>Impact</i> (Pengaruh) Peristiwa yang memiliki nilai berita dikarenakan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk masyarakat sehingga masyarakat akan tertarik untuk membaca berita tersebut (Latief, 2021). Masuknya kekinian dalam nilai berita disebabkan oleh unsur <i>currency</i>. Ini mencakup topik yang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan masyarakat luas, sehingga menarik perhatian lebih dari isu berita lainnya (Latief, 2021). Kerabat atau disebut juga keluarga mempunyai pengertian sebagai unit sosial terkecil dari masyarakat. Kerabat yang pada dasarnya merupakan arti keluarga kita atau dapat juga disebut sebagai keluarga besar. Entah dari keluarga ayah atau ibu, semua anggota tersebut termasuk kerabat. Oleh karena itulah kerabat dapat tersebar dimana pun sesuai dengan pilihan individu dan kelompok dalam memilih rumah yang ditempati (Rakhmat, 2016). Tidaklah berdiri sendiri antara partai politik dengan media, tetapi jauh lebih dalam lagi. Dengan kata lain, peran PR politik sudah masuk dalam kehidupan
	<i>Timelines</i> (Waktu)		
	<i>Proximity</i> (Kedekatan)		
	<i>Human</i> (Manusiawi)	<i>Interest</i>	
	<i>Oddity</i> (Unik)		
	<i>Impact</i> (Pengaruh)		
	<i>Currency</i> (Kekinian)		
4	Narasumber	Keluarga / Kerabat	
	Selebriti		

Politikus

pribadi kandidat untuk menjembatani komunikasi kandidat dengan pemilih lebih dalam (Rakhmat, 2016).

Arti kata dari polis sendiri adalah suatu kota yang memiliki status negara kota atau *city state*. Seiring berkembangnya zaman, pengertian politik juga turut berkembang di Yunani yang dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama. Politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok (Rakhmat, 2016).

Jurnalis

Jurnalistik, secara umum, merujuk pada serangkaian aktivitas yang melibatkan berbagai tahapan penting dalam dunia media. Proses ini dimulai dengan pencarian informasi, yang kemudian diikuti dengan pengumpulan data dan fakta yang relevan untuk memastikan akurasi berita yang akan disampaikan. Selanjutnya, informasi tersebut akan diproses dan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan cerita yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau audiens. Setelah itu, berita yang telah diproses akan disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan media yang digunakan, apakah itu dalam format tulisan, gambar, atau video. Proses penyajian ini bertujuan untuk menjangkau khalayak seluas mungkin, dengan menggunakan berbagai platform media, baik itu media cetak, siaran, maupun digital. Akhirnya, berita tersebut disebarkan dengan cepat agar dapat menginformasikan publik tentang peristiwa terkini atau isu penting dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tujuan utama dari seluruh rangkaian kegiatan jurnalistik ini adalah untuk menyediakan informasi yang aktual dan bermanfaat bagi masyarakat luas dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi (Rakhmat, 2016).

Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan "*society*" artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan

		organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok - kelompok yang terpecah secara ekonomi menurut (Karl Marx). Menurut Durkheim (2023), masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu - individu yang merupakan anggota -anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Iver & Page (2016) mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan - kebiasaan manusia (Rakhmat, 2016). Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum di masyarakat. Citra polisi di media bisa terbentuk positif, negatif, atau netral tergantung pada bagaimana pemberitaan disajikan (Rakhmat, 2016). Media adalah saluran komunikasi massa yang menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai platform seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik dan citra institusi, termasuk polisi (Rakhmat, 2016). Positif: sebuah berita yang mengarahkan pada positif jika pesan yang disajikan oleh berita utama mengandung unsur pujian terhadap objek pemberitaan (Suroso, 2015). Negatif: selain itu sebuah berita dapat dikatakan negatif jika pesan yang disampaikan dalam berita ini mengandung unsur ujaran keluhan, protes, dan pendapat negatif lainnya (Suroso, 2015). Netral: lain halnya, dalam sebuah berita dapat dikatakan netral jika pesan yang disajikan tidak dominan mengarah negatif ataupun positif tanpa mempengaruhi citra objek pemberitaan tersebut (Suroso, 2015). Citra positif muncul ketika pemberitaan
5	Nada Pemberitaan	Polisi Media Positif Negatif Netral
6	Citra Polisi	Positif

Negatif

menggambarkan polisi sebagai institusi yang profesional, adil, responsif, mampu menegakkan hukum secara konsisten, keberhasilan dalam mengungkap kasus, pelayanan yang humanis kepada masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan (Dwidja, 2017).

Citra negatif terbentuk ketika media menyoroti perilaku aparat yang menyalahgunakan kewenangan, terlibat dalam tindakan kekerasan berlebihan, melakukan korupsi atau pungutan liar, bersikap diskriminatif, gagal menyelesaikan kasus secara transparan, atau melanggar hak asasi manusia (Dwidja, 2017).

Netral

Citra netral terbentuk ketika pemberitaan tentang polisi disampaikan secara objektif tanpa memberikan penilaian positif maupun negatif. Berita semacam ini biasanya hanya menyampaikan fakta atau peristiwa apa adanya, tanpa menyisipkan opini, pujian, atau kritik, sehingga pembaca dapat menilai sendiri informasi yang disajikan berdasarkan data yang tersedia (Dwidja, 2017).

Sumber: Olahan Peneliti

Operasionalisasi konsep merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menerjemahkan konsep-konsep teoritis ke dalam indikator yang dapat diukur secara empiris. Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep dilakukan dengan merinci beberapa kategori utama yang berkaitan dengan pemberitaan mengenai kepolisian. Adapun kategori yang dianalisis meliputi tema berita, jenis berita, nilai berita, narasumber, nada pemberitaan, serta citra polisi.

Tema berita dalam penelitian ini terdiri dari beberapa indikator utama. Pertama, kinerja polisi, yang didefinisikan sebagai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, pelayanan publik, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep ini mengacu pada kajian (Lenora & Tania, 2023) yang menyoroti bahwa kinerja suatu lembaga dapat diukur berdasarkan pencapaian tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, kompetensi polisi yang mencakup keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan individu dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi ini meliputi kemampuan analisis, pengambilan keputusan, serta keterampilan komunikasi yang baik sebagaimana dijelaskan oleh (Lenora & Tania, 2023). Ketiga, profesionalisme polisi yang merujuk pada sikap

disiplin, etika kerja, dan kepatuhan terhadap standar operasional serta kode etik kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara adil dan bertanggung jawab (Lenora & Tania, 2023). Keempat, moralitas polisi yang mengacu pada prinsip etika dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam tugas kepolisian, termasuk integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan (Lenora & Tania, 2023). Selain itu, terdapat kategori lainnya yang mencakup berbagai aspek pemberitaan mengenai kepolisian yang tidak termasuk dalam indikator sebelumnya (Lenora & Tania, 2023).

Jenis berita dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *hard news* dan *soft news*. *Hard news* merupakan berita yang memiliki nilai urgensi tinggi dan menyajikan informasi faktual terkait peristiwa penting yang sedang terjadi (Latief, 2021). Jenis berita ini sering kali berkaitan dengan isu-isu hukum, kriminalitas, atau kebijakan publik yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, *soft news* merupakan berita yang lebih ringan dan bertujuan untuk menghibur, menambah wawasan, serta menarik emosi masyarakat (Latief, 2021). *Soft news* sering kali berkaitan dengan aspek *human interest* yang menggambarkan sisi lain dari kehidupan kepolisian atau pengalaman individu yang relevan dengan topik tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengukur nilai berita yang terkandung dalam pemberitaan mengenai kepolisian. Terdapat beberapa indikator utama dalam nilai berita, yaitu *magnitude*, *significance*, *conflict*, *timeliness*, *proximity*, *human interest*, *oddity*, *impact*, dan *currency* (Latief, 2021). *Magnitude* merujuk pada peristiwa yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan sering kali disertai dengan angka atau data statistik yang signifikan. *Significance* mengacu pada peristiwa yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. *Conflict* dalam berita berkaitan dengan pertentangan baik antar individu maupun kelompok, seperti demonstrasi, tindak kriminal, atau kebijakan kontroversial yang melibatkan kepolisian. *Timeliness* atau kebaruan berita menjadi aspek penting dalam nilai berita, di mana semakin cepat suatu peristiwa diberitakan, maka semakin tinggi nilai beritanya. *Proximity* atau kedekatan berita dengan audiens dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat, baik dalam aspek geografis, psikologis, maupun sosial. *Human interest* menggambarkan peristiwa yang menyentuh

perasaan atau menarik empati pembaca. *Oddity* mencakup peristiwa unik yang jarang terjadi dan memiliki daya tarik tersendiri. *Impact* menyoroti peristiwa yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, sementara *currency* berfokus pada topik yang sedang menjadi tren atau banyak diperbincangkan.

Dalam penelitian ini, sumber informasi atau narasumber yang dikaji meliputi beberapa kategori, yaitu keluarga atau kerabat, selebriti, politikus, jurnalis, masyarakat, polisi, dan media (Rakhmat, 2016). Keluarga dan kerabat sering kali memberikan perspektif yang lebih personal terkait suatu peristiwa. Sementara itu, selebriti dan politikus sering kali menjadi narasumber dalam pemberitaan yang berkaitan dengan opini publik atau kebijakan tertentu. Jurnalis memiliki peran penting dalam menyusun dan menyajikan berita yang akurat serta sesuai dengan kode etik jurnalistik. Masyarakat secara umum juga dapat menjadi sumber berita melalui kesaksian atau pengalaman yang mereka alami secara langsung. Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum di masyarakat dan media adalah saluran komunikasi massa yang menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai platform seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik dan citra institusi, termasuk polisi (Rakhmat, 2016).

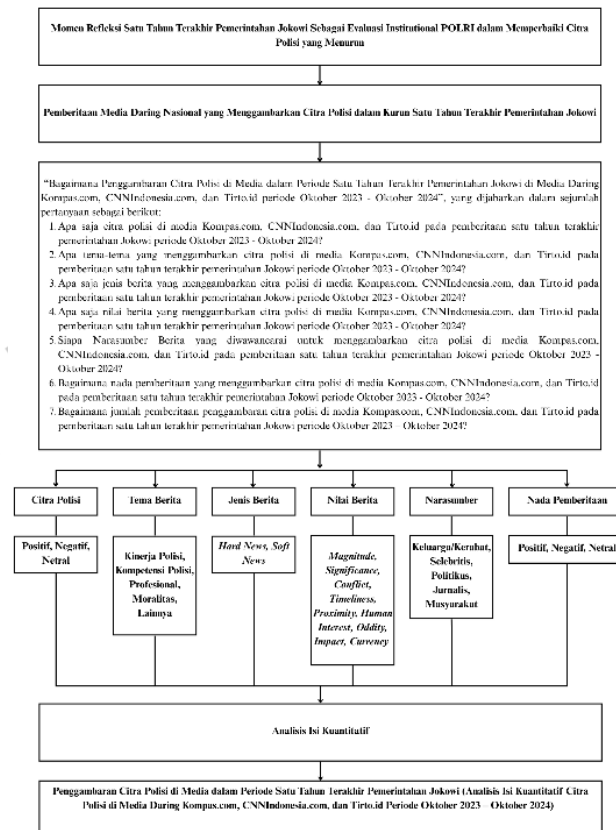
Nada pemberitaan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu positif, negatif, dan netral (Suroso, 2015). Pemberitaan dikatakan positif apabila mengandung unsur pujian terhadap kepolisian, seperti pemberitaan mengenai keberhasilan dalam mengungkap kasus kriminal atau pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sebaliknya, nada negatif muncul ketika berita mengandung kritik, keluhan, atau pandangan negatif mengenai kinerja kepolisian, seperti kasus penyalahgunaan wewenang atau tindakan represif. Sementara itu, berita netral mengacu pada pemberitaan yang bersifat deskriptif, hanya menyampaikan fakta tanpa kecenderungan membangun persepsi tertentu terhadap kepolisian.

Citra polisi dalam pemberitaan dianalisis berdasarkan dua kategori, yaitu positif, negatif, dan netral (Dwidja, 2017). Citra positif muncul ketika pemberitaan menggambarkan polisi sebagai institusi yang profesional, adil, dan responsif. Hal ini terlihat dari penekanan media terhadap kinerja polisi yang mampu menegakkan hukum secara konsisten, keberhasilan dalam mengungkap kasus, pelayanan yang

humanis kepada masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan. Sementara itu, citra negatif terbentuk ketika media menyoroti perilaku aparat yang menyalahgunakan kewenangan, terlibat dalam tindakan kekerasan berlebihan, melakukan korupsi atau pungutan liar, bersikap diskriminatif, gagal menyelesaikan kasus secara transparan, atau melanggar hak asasi manusia. Citra negatif ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam upaya reformasi institusi kepolisian, terutama dalam membangun kepercayaan publik. Dengan mengacu pada aspek-aspek tersebut, analisis citra polisi dalam media daring dapat lebih mendalam, tidak hanya melihat opini publik secara umum tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepolisian.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menggunakan model objektivitas Rahma Ida sebagai alat ukur untuk menganalisis isi pemberitaan terkait citra polisi di media daring. Model ini dipilih karena relevan dengan pendekatan analisis isi kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, operasionalisasi konsep dalam penelitian ini telah dirancang secara sistematis untuk mengukur berbagai aspek pemberitaan kepolisian di media daring selama satu tahun terakhir pemerintahan Jokowi.

2.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polisi) merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Citra yang baik dari kepolisian tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja nyata di lapangan, tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana institusi tersebut dipersepsikan publik, yang dalam hal ini sebagian besar dibentuk melalui media massa. Di era digital, media massa *online* memiliki peran dominan dalam menyebarluaskan informasi dan membentuk persepsi masyarakat. Oleh karena itu, pemberitaan media *online* menjadi saluran strategis dalam membangun dan merekonstruksi citra positif Polisi di tengah masyarakat.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dengan identifikasi persoalan umum mengenai pentingnya membentuk citra baik Polisi di Indonesia. Citra ini menjadi indikator bagi terciptanya hubungan harmonis antara institusi kepolisian dan masyarakat, serta sebagai wujud dari akuntabilitas publik terhadap kinerja lembaga keamanan negara. Dalam konteks pemerintahan Presiden Joko

Widodo periode 2023–2024, peran Polisi sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban publik mendapatkan sorotan yang cukup besar dari media. Hal ini kemudian menempatkan media online sebagai agen utama dalam membentuk narasi publik terkait performa dan citra institusi kepolisian.

Selanjutnya, fokus kerangka berpikir diarahkan pada pemberitaan media massa *online* tentang citra Polisi, khususnya pada media Kompas.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis bagaimana media-media tersebut menggambarkan citra Polisi dalam pemberitaannya selama satu tahun terakhir pemerintahan Jokowi periode 2023–2024. Untuk menjawab fokus tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi landasan analisis, yaitu Apa saja tema-tema utama yang muncul dalam pemberitaan mengenai citra Polisi di media Kompas.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id?; Apa jenis-jenis berita yang mendominasi dalam menggambarkan citra Polisi di ketiga media tersebut?; Bagaimana nilai berita yang diangkat dalam pemberitaan citra Polisi bersifat informatif, edukatif, atau persuasif?; Siapa saja narasumber yang dikutip atau diwawancarai dalam pemberitaan, dan bagaimana kredibilitas serta posisi mereka mempengaruhi *framing* citra Polisi?; Bagaimana nada pemberitaan yang digunakan oleh media dalam menyampaikan informasi tentang Polisi apakah positif, netral, atau negatif?; dan Bagaimana bentuk citra polisi yang dikonstruksikan oleh masing-masing media, dan bagaimana konsistensinya dalam menyampaikan narasi tentang Polisi?

Seluruh kerangka berpikir ini kemudian mengarah pada tujuan akhir dari penelitian, yaitu untuk mengevaluasi pembingkai berita dalam membangun citra positif Kepolisian Negara Republik Indonesia di media massa. Studi ini secara spesifik dilakukan melalui analisis isi kuantitatif terhadap pemberitaan media *online* Kompas.com, CNNIndonesia.com, dan Tirto.id yang keduanya merupakan portal berita terkemuka dengan jangkauan pembaca yang luas di Indonesia. Melalui kerangka berpikir ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana strategi pembingkai media digunakan untuk membentuk persepsi positif terhadap institusi kepolisian di era pemerintahan Jokowi periode 2023–2024.

